



PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Mishab bin Muhur, tempat lahir Monjok, tanggal 27 Agustus 1965, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Gang Panda VIII, Lingkungan Monjok Culik, RT.001 RW.217, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon I"**

Huriah binti Rakyat, tempat lahir Monjok Culik, tanggal 3 Januari 1973, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gang Panda VIII, Lingkungan Monjok Culik, RT.001 RW.217, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register dengan Nomor: 297/Pdt.P/2018/PA.Mtr., tertanggal 13 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan

hal 1 dari 13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Nikah dengan alasan-alasan/ dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 27 Desember 1990, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Rakyat dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Suhaimi dan Munaharudin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Angga Hafriawan, laki-laki, umur 26 Tahun (Monjok Culik, 11 April 1992).
 - b. Ary Hamdzani, laki-laki, umur 23 Tahun (Monjok Culik, 31 Januari 1995).
 - c. Fahrozi Rifky, laki-laki, umur 16 Tahun (Mataram, 1 Mei 2002).
 - d. Nisrina Maulida, perempuan, umur 9 Tahun (Mataram, 18 Maret 2009).
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

hal 2 dari 13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

hal 3 dari **13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Mtr.**



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271012705650001 atas nama **Mishab** tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1),
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271015007690002 atas nama **Huriah** tanggal 25 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2),
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 235003/99/01937 atas nama **Mishab** tanggal 6 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3),

B. Saksi:

1. **Hanafi bin H. Ahmad**, tempat tanggal lahir Ampenan 9 Juni 1964, umur 53 Tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Koperasi Otak Desa RT.001. Kelurahan Dayen Pekan, Kecamatan Ampenan, kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon selaku Ipar Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram pada tanggal 27 Desember 1990 dan saksi hadir ketika para Pemohon menikah;

hal 4 dari 13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



-- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama :Rakyah dan yang menjadi saksi nikah adalah Suhaimi dan Munaharudin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

-Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

---Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);

-----Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;

-Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

- a. Angga Hafriawan, laki-laki, umur 26 Tahun (Monjok Culik, 11 April 1992).
- b. Ary Hamdzani, laki-laki, umur 23 Tahun (Monjok Culik, 31 Januari 1995).
- c. Fahrozi Rifky, laki-laki, umur 16 Tahun (Mataram, 1 Mei 2002).
- d. Nisrina Maulida, perempuan, umur 9 Tahun (Mataram, 18 Maret 2009).

- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum mempunyai buku nikah

2. **Hamzah bin Muhamad**, lahir di Ampenan tanggal 24 Februari 1964, Umar 53 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Koperasi Gang Jambu 10 Sukaraja Barat, kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

hal 5 dari **13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Mtr.**



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon selaku Ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram pada tanggal 27 Desember 1990 dan saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama :Rakyah dan yang menjadi saksi nikah adalah Suhaimi dan Munaharudin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Angga Hafriawan, laki-laki, umur 26 Tahun (Monjok Culik, 11 April 1992).
 - b. Ary Hamdzani, laki-laki, umur 23 Tahun (Monjok Culik, 31 Januari 1995).
 - c. Fahrozi Rifky, laki-laki, umur 16 Tahun (Mataram, 1 Mei 2002).
 - d. Nisrina Maulida, perempuan, umur 9 Tahun (Mataram, 18 Maret 2009).
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum mempunyai buku nikah

hal 6 dari 13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah dalam bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita angka 1 sampai dengan angka 7, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 P.2, dan P.3. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk P I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk P II) para Pemohon adalah bukti tertulis cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

hal 7 dari **13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Mtr.**



Menimbang bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah mempunyai 4 (empat) orang anak

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3., dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 1990 bertempat di Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang ,Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama ; Rakyat dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta para Pemohon tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab/darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya

hal 8 dari 13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan
perturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Angga Hafriawan, laki-laki, umur 26 Tahun (Monjok Culik, 11 April 1992).
 - b. Ary Hamdzani, laki-laki, umur 23 Tahun (Monjok Culik, 31 Januari 1995).
 - c. Fahrozi Rifky, laki-laki, umur 16 Tahun (Mataram, 1 Mei 2002).
 - d. Nisrina Maulida, perempuan, umur 9 Tahun (Mataram, 18 Maret 2009).
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon belum pernah memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi

hal 9 dari 13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Hukum Islam yang menyebutkan: “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

“ Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 1991 bertempat di Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, patut dinyatakan

hal 10 dari 13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang-undnag Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada wilayah hokum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor: 297/Pdt.P/2017/PA.Mtr. tanggal 2018, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017 ;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mishab bin Muhur**) dengan Pemohon II (**Huriah binti Rakyat**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1990, di Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;

hal 11 dari 13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hj.Kartini. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad,M.H dan Drs.H.Miftakhul Hadi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Kalamuddin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Muhammad,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Miftakhul Hadi, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj.Kartini

Panitera Pengganti

ttd

Kalamuddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|--------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp. | 130.000,- |
| 3. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 186.000,-
(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

hal 12 dari 13 **Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Mtr.**



Panitera'

MARSOAN, S.H.

hal 13 dari 13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)